

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB X
PERANG DINGIN KOMPETISI ANTARA
AMERIKA SERIKAT DAN UNI SOVIET



Dra. Sri Mastuti, P. M. Hum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

BAB 10

PERANG DINGIN KOMPETISI ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN UNI SOVIET

- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menganalisis permasalahan Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global
: Menganalisis pengaruh Glasnot da Perestroika terhadap perdamaian dunia
- C. KKD :-
- D. Materi

Perang dingin (*cold war*), adalah istilah yang menggambarkan konflik antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Istilah “Perang Dingin” sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut. Penyebab langsungnya adalah perpecahan dalam aliansi antara Uni Soviet, AS dan Inggris. Mereka tidak sepakat mengenai penyelesaian masalah rekonstruksi negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II , upaya memelihara ketertiban dan keamanan dunia, dan masalah penanganan perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh PD II. Ternyata aliansi antara Uni Soviet dan AS selama berlangsungnya perang hanya bersifat semu belaka yang didasarkan atas kepentingan bersama untuk menghadapi negara-negara Axis (Jerman, Italia dan Jepang). Selama berlangsungnya perang, tidak terdapat kesepakatan bulat di antara mereka mengenai isu-isu jangka panjang serta penyelesaian perbedaan pendapat di antara keduanya.

Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) merasa berjasa dalam memenangkan PD II, dan keduanya sama-sama merasa berhak untuk memperoleh wilayah di bawah pengaruh mereka. Hal inilah yang menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat konflik tidak langsung karena mereka menghindari perang terbuka untuk memperebutkan suatu wilayah. Keduanya memilih untuk melakukan perang proksi, yaitu memanfaatkan pihak ketiga (Negara-negara dunia ketiga) untuk mengalahkan musuhnya masing-masing. Contohnya, US membantu beberapa Negara di Amerika Latin dan Asia Tenggara dalam menjalankan revolusi Komunis. Dan kemudian AS juga ikut

campur dalam mengirimkan bantuan tentara dan logistik agar paham Komunis tidak berhasil menyebar di Negara-negara tersebut. Beberapa intervensi politik yang



Gambar 1: Seorang anak Korea melintas di depan tank M-46 (id.wikipedia.org)



Gambar 2: US AF menyerang rel kereta Api di Wonson Selatan, pantai Timur Korea Utara (id.wikipedia.org)

dilakukan US dan AS dalam rangka memperebutkan pengaruh di Negara-negara dunia ketiga, adalah konflik Tiongkok yang terjadi

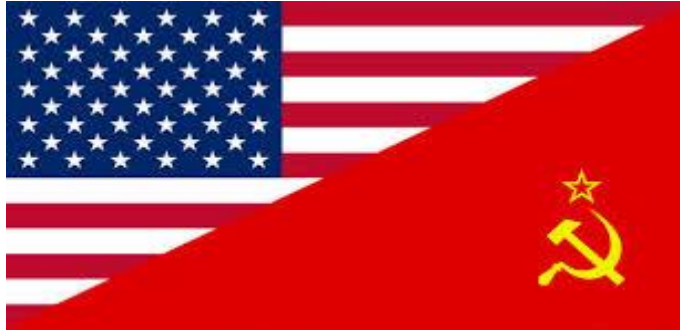
antara Tentara Pembebasan Rakyat (Komunis) pimpinan Mao Zedong yang didukung oleh US dan Pemerintahan Nasionalis Kuomintang, pimpinan Chiang Kai-shek yang didukung AS. Konflik ini dimenangkan oleh Komunis, dan Chiang Kai-shek mundur ke kepulauan Taiwan, dan mendirikan Negara Taiwan. Salah satu persaingan yang sangat jelas terjadi antara US dan AS, adalah dalam Perang Korea. Perang Korea terjadi pada bulan Juni 1950, yang ditandai dengan invasi Tentara Rakyat Korea Utara pimpinan Kim Il-Sung terhadap Korea Selatan. Peran Joseph Stalin sangat besar, karena seluruh rancangan untuk menyerang Korea Selatan berasal dari Stalin. Genjatan senjata baru disetujui pada tahun 1953, setelah kematian Stalin. Berakhirnya Perang Korea, membuat Korea Utara menciptakan suasana kediktatoran yang terpusat dan brutal, dan Korea Selatan mendapat bantuan dari Amerika untuk membangun negerinya.

Selain keikutsertaan AS dan US dalam dua perang besar, seperti yang disebutkan diatas, perebutan pengaruh atau persaingan juga terjadi dalam beberapa bidang, meliputi bidang politik, ekonomi, militer, dan ruang angkasa. Dalam bidang Politik, pihak AS berusaha menjadikan negara-negara yang baru merdeka, dan negara-negara sedang berkembang menjadi sebagai negara demokrasi, dengan tujuan agar hak-hak asasi manusia dapat terjamin. Untuk negara yang kalah perang yaitu Jerman dan

Jepang dikembangkan paham demokrasi dan sistem hubungan perekonomian kapitalisme. Sedangkan pihak US mengembangkan paham sosialisme-komunisme dengan pembangunan ekonomi rencana lima tahun dengan cara diktator, tertutup. Dengan sistem ini US dikenal sebagai “Negara Tirai Besi”, sedangkan negara di bawah pengaruhnya di Asia yaitu Cina mendapat julukan “Negara Tirai Bambu”.

Dalam bidang Ekonomi, AS dan US saling memperebutkan pengaruhnya dengan menjadi pahlawan ekonomi yaitu menjadi negara kreditur dengan memberikan bantuan, pinjaman kepada negara-negara berkembang, seperti *Mashall Plan (Eropean Recovery Program)* yakni bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara di kawasan Eropa Barat. Selain itu Presiden Henry S Truman memberikan bantuan teknis dan ekonomi khusus kepada Turki dan Yunani, yang dikenal dengan *Truman Doctrin*. Dalam bidang Militer, perebutan pengaruh antara AS dengan US dalam bidang militer dalam bentuk pakta pertahanan militer. Berlangsungnya Perang Dingin menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet saling curiga satu dengan yang lain. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang terbuka, kedua negara adidaya beserta para sekutunya saling memperkuat pertahanan dan militernya.

Di kawasan Atlantik Utara, Amerika Serikat bersama sekutunya Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada, setuju untuk membentuk persekutuan militer bersama. Persekutuan militer itu disebut *North Atlantic Treaty Organization (NATO)* yang berdiri tahun 1949. Keanggotaan NATO diperluas lagi dengan masuknya Italia dan Islandia, Yunani, dan Turki pada tahun 1952 dan Jerman Barat tahun 1955. Terdapat beberapa ketentuan di dalam NATO bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, sehingga semua negara anggota wajib saling memberi bantuan. Amerika Serikat juga berusaha menggelar kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Untuk keperluan itu, Amerika Serikat bersama Turki, Irak, Iran, dan Pakistan membentuk kerja sama militer. Nama kerja sama militer itu adalah *Middle East Treaty Organization* yang disingkat METO atau dikenal dengan CENTO (*Central Treaty Organization*) yang berdiri tahun 1959 yang semula bernama Pakta Bagdad (1955).



Gambar 3: Bendera Amerika Serikat dan Uni Soviet (www.amazine.co)

Untuk menahan laju perluasan komunis di Asia Tenggara, Amerika Serikat membentuk kerja sama militer yang disebut *South East Asia Treaty Organization* atau SEATO. Pada tahun 1954, SEATO beranggotakan negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Thailand, Filipina, dan Selandia Baru. Sementara itu, perkembangan



Gambar 4 : Mikhail Gorbachev (www.globalsecurity.org)

komunis di Pasifik Selatan dihambat Amerika Serikat dengan membentuk kerja sama militer. Kerja sama pertahanan di Pasifik Selatan disebut ANZUS (*Australia, New Zealand, and United States*) yang beranggotakan AS, Australia dan New Zealand. Sedangkan Uni Soviet berusaha mengimbangi kekuatan militer Blok Barat dengan membentuk kerja sama militer. Pada 14 Mei 1955 Uni Soviet bersama Mongolia, Polandia, Cekoslowakia, Bulgaria, Rumania, dan Jerman Timur membentuk *Pact of Mutual Assistance and Unifield Command* yang dikenal dengan sebutan Pakta Warsawa. Dan dalam bidang ruang angkasa, perebutan pengaruh antara AS dengan US juga melanda pada kecanggihan teknologi ruang angkasa lebih lanjut di bahas pada subbab eksploitasi teknologi ruang angkasa.

Berakhirnya Perang Dingin

Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Gorbachev dilantik pada saat perekonomian US yang sedang stagnan, dan penerimaan valuta asing menurun tajam, akibat dari turunnya harga minyak dunia. Sebagai presiden Uni Soviet, Gorbachev berusaha memperbaiki keadaan negara dengan meluncurkan berbagai program pembaruan dalam rangka merevitalisasikan ideologi komunis yakni *perestroika* (restrukturisasi), *glasnost* (keterbukaan). Pembaruan

ini dimaksudkan untuk penyelesaian berbagai macam masalah ekonomi dan politik di Uni Soviet yang sedang merosot.

Perestroika diluncurkan untuk mengefisienkan sistem kuota produksi, kepemilikan usaha (sektor swasta), dan membuka peluang masuknya investor asing. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan sumber daya Negara ke pengembangan sektor sipil yang lebih produktif, bukan pembiayaan militer yang boros. Sedangkan Glasnot, merupakan kebijakan yang memungkinkan meningkatnya kebebasan pers dan transparansi lembaga-lembaga Negara. Glasnot juga memiliki tujuan untuk mengurangi korupsi dalam partai komunis, mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Komite Sentral, dan juga untuk meningkatkan hubungan Uni Soviet dengan Negara Barat. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra namun Mikhail Gorbachev dengan kualitas kepimpinannya dapat menghadapi penentang perestroika. Beberapa ini adalah akibat dari kebijakan yang dikeluarkan:

Bidang ekonomi

Pemerintahan melakukan perluasan independensi perusahaan-perusahaan negara, serta memperkuat perkembangan sektor koperasi. Pada musim panas tahun 1990 pemerintah memperbolehkan sistem kepemilikan pribadi dan privatisasi. Dimulailah "Ekonomi Pasar" di mana salah satu program yang cukup terkenal "Program 500 hari". Namun langkah tersebut tidak dapat memperbaiki keadaan, justru menambah beban hidup dan kecemasan di masyarakat.

Bidang Budaya

Glasnost dan demokratisasi membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan intelektual dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Dihapuskannya sensorship terhadap pers yang bersifat ideologis yang selama ini mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi. Para pecinta seni sastra, dapat membaca karya-karya Aleksandr Solzhenitsyn, Boris Pasternak, Losif Brodsky, Isak Babel, Sergei Bulgakov, Andrei Platonov dan karya-karya sastrawan Rusia lainnya yang selama ini tidak diperkenankan untuk dimiliki dan dibaca di Uni Soviet. Ruang gerak para seniman avant-grade kembali dibuka. Dunia perfilman pun tak kalah menggeliat. Musik rock yang

sebelumnya dilarang dan dianggap sebagai musik kapitalis mengalami perkembangan di kalangan kaum muda Rusia.

Kehidupan spiritual keagamaan juga mengalami perubahan, banyak terjadinya restorasi tempat-tempat beribadah dan tempat-tempat suci berbagai agama.

Bidang Politik

Glasnost (keterbukaan) dan Demokratizatsiya (demokratisasi). Pemikiran Politik Baru termasuk inisiatif diakhirinya Perang Dingin. Glasnost (keterbukaan) berasal dari kata 'golos' yang artinya suara. Ini mengisyaratkan bahwa pembungkaman yang tersistemasi selama tujuh dasawarsa telah mengakibatkan tidak terakomodasinya partisipasi publik dalam proses kehidupan politik dan sosial. Glasnost (keterbukaan) memungkinkan masyarakat Soviet mengetahui tak hanya sisi baik, tapi juga sisi buruk masyarakat Soviet. Gorbachev (1988) tentang Glasnost (keterbukaan) menyatakan, "Kita berusaha mencapai keterbukaan yang lebih besar dalam semua aspek kehidupan masyarakat."

Kebijakan Luar negeri

Arah kebijakan baru Uni Soviet di bawah Gorbachev ini membawa angin segar bagi hubungan Uni Soviet dengan negara-negara Barat dan AS. Uni Soviet yang selama ini dianggap tertutup, dianggap telah memunculkan wajah baru yang ramah pada masa kepemimpinan Gorbachev. Dengan adanya memperbaiki hubungan dengan lawan politik Perang Dingin ini dapat mengurangi ketegangan antara hubungan antara dua kekuatan adidaya yang menguasai dunia secara tidak langsung paska Perang Dunia II. Namun di sisi lain, porsi perhatian Moskow terhadap sekutu tradisional yang tergabung dalam Pakta Warsawa menjadi berkurang.

Gorbachev berhasil meredakan ketegangan internasional, dengan cara berpergian ke luar negeri dengan berpakaian barat, emigrasi orang Yahudi diringkankan; perusahaan-perusahaan asing diundang untuk merangsang ekonomi Soviet. Pada tahun 1988, Gorbachev menarik tentara Uni Soviet dari Afghanistan dan mengakui pada invansi pada tahun 1979 adalah sebuah kesalahan. Pada tahun 1989, Perestroika dan glasnost

menyebar di kalangan masyarakat Eropa Barat yang membenci dominasi Uni Soviet. Selama tahun 1989 dan 1990, diseluruh Eropa Timur rakyat memperlihatkan kebencian mereka kepada kepemimpinan Komunis dan menuntut pembaharuan demokratis.

Kebijakan Glasnost dan Perestroika yang dijalankan pemerintah Gorbachev ternyata membawa pengaruh bagi semakin menguatnya gerakan separatisme, akibat semangat keterbukaan dan demokratisasi yang menjadi inti dari kebijakan tersebut. Berbagai konflik antar etnis yang selama ini bersembunyi, mulai muncul menjadi konflik terbuka. Ketidakmampuan pemerintah pusat dalam menangani masalah ekonomi juga semakin mendorong ketidakpuasaan di republik-republik konstituen Uni Soviet. Ketidakpuasaan ini pada gilirannya mendorong munculnya kekuatan oposisi setempat yang mulai menyerukan ide-ide separatisme. Pada tanggal 19 Agustus disiarkan "Maklumat Pemimpin Uni Soviet" yang mengumumkan tentang pemberhentian Mikhail Gorbachev dari jabatan Presiden karena alasan kesehatan dan penyerahan mandat kepada Wapres Gennady Yanaev, serta dibentuknya Komite Negara untuk Keadaan Darurat (GKCP) dan pengumuman keadaan darurat di daerah-daerah.

Pada tanggal 21 Agustus terjadi bentrokan antara demonstran pro-Yeltsin dan tentara pendukung kudeta. Setelah jatuhnya korban di pusat kota Moskow itu kekuatan kudeta dapat dipatahkan. Kekuatan kudeta dapat dipatahkan namun disintegrasikan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat terus berlanjut.

Tanggal 8 Desember beberapa pemimpin republik mengadakan pertemuan rahasia tanpa mengundang Gorbachev. Pemimpin ketiga negara bagian yakni: Boris Yeltsin (RSFSR), Leonid Kravchuk (Ukraina SSR) dan S. Shushkevich (Belarus SSR) mengumumkan berakhirnya Uni Soviet dan negara-negara bekas konstituennya membentuk apa yang disebut *Sodruzhestvo* (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka). Tanggal 24 Desember 1991 Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai presiden Uni Soviet dan secara otomatis mengakhiri eksistensi Uni Soviet. Revolusi yang terjadi akhir dekade abad 20 telah membawa kehancuran Uni Soviet yang telah dibangun selama lebih kurang tujuh dasawarsa. Uni Soviet runtuh, menyisakan kepingan-kepingan negara-negara berdaulat. Rusia bersama republik lainnya (minus negara-negara Baltik) bekas raksasa komunis ini membentuk sebuah "uni" baru dengan

hubungan yang lebih longgar yang menjamin kedaulatan masing-masing. Dengan ini Uni Soviet telah runtuh sebagai kekuatan utama di dalam urusan-urusan dunia.

Dampak Perang Dingin

Paska Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu negara adi kuasa, telah mengawali babak baru dalam tatanan studi hubungan internasional. Studi Hubungan Internasional yang semula berkisar pada tataran isu politik dan keamanan yang bersifat bipolar dan *state centric*, kini justru telah bergeser ke dalam isu-isu alternatif seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, gender, lingkungan hidup dan isu-isu lainnya.

Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat hadir sebagai kekuatan utama dengan mengusung paham neoliberalisme. Hal ini terlihat dari bagaimana situasi ekonomi kini ditandai dengan tingginya tingkat *economic interdependence* antarnegara, mulai dari sektor industri, jasa, tenaga kerja, hingga investasi. Fleksibilitas kemudian menjadi istilah yang sangat mendominasi sebagaimana berbagai sumber ekonomi dapat dikelola dengan cara-cara yang tidak rigid karena aspek-aspek produksi pun dapat bergerak dengan sangat bebas. Gertler (1998, 421) menyatakan bahwa fleksibilitas tersebut ditandai dengan adanya sektor baru dalam produksi, cara baru dalam menyediakan pelayanan bisnis dan finansial, pasar baru, komersialisme, serta inovasi organisasional dan teknologikal. Tidak dapat dipungkiri bahwa neoliberalisme dengan kekhasan fleksibilitasnya yang kemudian didukung oleh kemajuan globalisasi semakin membuat batas-batas antar negara memudar atau *borderless*. Hal inilah yang kemudian menyebabkan peta geopolitik negara-negara di dunia mengalami pergeseran.

Selain itu, berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan munculnya negara super power. Dengan adanya negara super power, maka perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemegang modal. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menginvestasikan modal mereka ke negara-negara berkembang, yang upah buruhnya masih relatif rendah. Sehingga keuntungan mereka juga melambung tinggi, namun bagi Negara yang ditempati juga membawa dampak positif, karena diberi kesempatan untuk membuka usah, sehingga pertumbuhan

ekonomi di negara itu juga akan tumbuh pesat. Jadi keduanya diuntungkan dalam usaha ekonomi ini.

Perubahan sistem perekonomian paska Perang Dingin juga membawa dampak negative, karena pemilik modal berlomba-lomba untuk menguasai dunia perekonomian, secara tidak langsung juga membawa unsur politik didalamnya. Sehingga pemilik modal besar mendapatkan keuntungan besar, sementara negara yang modalnya terbatas keuntungannya juga kecil. Karena itu munculah istilah globalisasi ekonomi di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukanlah beberapa tindakan seperti misalnya menyatukan mata uang, contoh yang sangat terlihat adalah negara-negara di kawasan eropa yang menyatukan mata uang mereka menjadi euro.

Dalam bidang Politik, paska Perang Dingin memunculkan AS sebagai negara *superpower* tunggal yang selanjutnya memunculkan tatanan baru dunia (*New World Order*). Kesuksesan AS disebabkan karena paham kapitalis yang dianut AS menyebabkan tidak adanya akhir dari akumulasi kapital, sehingga membuat AS secara perlahan dapat membangun diri menjadi negara dengan perekonomian terbesar. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa paham liberalis-kapitalis cocok bagi pembangunan perekonomian dunia yang kemudian melahirkan institusi-institusi perekonomian internasional dengan menerapkan paham liberal-kapitalis tersebut. Sedangkan munculnya AS sebagai hegemon tunggal yang memiliki perekonomian baik dan cenderung stabil serta militer yang kuat dapat diidentifikasi sebagai meningkatnya supermasi. Akan tetapi munculnya banyak negara-negara baru yang mendominasi pasar seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, bahkan bangkitnya Jerman dan Perancis menandai munculnya aktor baru dalam geopolitik. Munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut tengah bersiap untuk menjadi kekuatan dunia yang baru sehingga sumber kekuatan dunia tidak hanya berasal dari satu kekuatan tunggal saja kemudian dinamakan sebagai *multipolar* sebagai periode ketiga dalam *new world order* (Krauthammer 1991, 5-6). Walaupun posisi AS sebagai hegemon tunggal belum terkalahkan hingga saat ini, negara-negara seperti Tiongkok, Jerman, Jepang dan negara-negara lainnya telah mengalami kemajuan perekonomian yang luar biasa serta sudah mampu memberikan pengaruhnya pada negara lain melalui kekuatan ekonominya. Maka dari itu negara-negara tersebut kemudian dinamakan

sebagai *shadow hegemon* yaitu negara-negara yang secara tidak langsung menjadi hegemon tanpa harus menyatakan secara langsung seperti AS dan Uni Soviet pada era Perang Dingin.

Daftar Pustaka

Gentler, Meric S. 1998. *The Limits to Flexibility: Comments on the post-Fordist Vision of Production and Its Geography* dalam *Transactions of the Institute of British Geographers*, Vol. 13, No, 4, Hal.419-432

Joseph L. Noguee and Robert H. Donaldson,(1981),” *Soviet Foreign Policy Since Word War II*”, New York, Pergamon Press

Krauthammer, Charles. 1991. “*The Unipolar Moment Revisited*”, dalam *The National Interest*, Vol. 03, hlm. 5-7

Nainggolan,Poltak Partogi. 2004. “ *Konflik dan Perkembangan Kawasan paska Perang Dingin*”. Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi,.

Wardaya, F.X. Baskara Tulus.2006. ”*Perang Dingin dan reinterpretasi Sejarah Indonesia*”,kumpulan karangan, Yogyakarta.